

Asimilasi Budaya Tionghoa dan Budaya Jawa di Surakarta Pada Tahun 1966-1998 Dan Relevansi Bagi Pendidikan Multikultural¹

Oleh:
Romadoni Huda F²
Sariyatun, Riyadi³

ABSTRACT

The aim of this research are to find out: (1) the background of Chinese and Javanese cultural assimilation in Surakarta 1966-1998, (2) The process of Chinese and Javanese cultural assimilation in Surakarta 1966-1998, (3) The impact of Chinese and Javanese cultural assimilation after 1966-1998, (4) The relevance of the research result of Chinese-Surakarta ethnic assimilation in 1966-1998 for multicultural education.

The method used in this research are qualitative research methods. The steps taken in this method including data collection, data reduction, data analysis, presentation of data, and conclusion.

The result of this research are : (1) The background of Chinese and Javanese cultural assimilation are caused by internal factor and external factor. Internal factor include the condition of Chinese community in the middle of the Javanese majority and economic problem. The external factor are appeared because of the New Order government policy. (2) The process of Chinese and Javanese cultural assimilation are divided into two periods, Old Order period led by Soekarno and New Order period led by Soeharto. (3) The impact of Chinese and Javanese cultural assimilation are contained in performing art and celebration day that contains cultural combination between Chinese and Javanese culture. (4) The result of this research are relevant with education field. Particularly as additional teaching materials for multicultural education in high school education.

Keywords: *Multicultural education, cultural assimilation, Chinese*

¹ Rangkuman Penelitian Skripsi

² Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS Surakarta

³ Dosen Pembimbing Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS Surakarta

A. Pendahuluan

Permasalahan etnis Tionghoa di Indonesia sangat menarik untuk dikaji. Dalam sejarah Nasional, etnis Tionghoa di Indonesia akan nampak berbeda jika dibandingkan dengan etnis minoritas pendatang lain, seperti Arab dan India.

Secara khusus, etnis Tionghoa terlibat ataupun dilibatkan dalam politik pemerintahan dan ekonomi kolonial Belanda.

Pada masa kolonial di Indonesia persepsi masyarakat Indonesia mengenai etnis Tionghoa berubah-ubah sesuai dengan perubahan dan tuntutan zaman. Terdapat tiga orientasi sosio-politis di antara para etnis Tionghoa lokal, yaitu : (1) Berorientasi ke negara China, percaya bahwa orang Tionghoa lokal adalah anggota bangsa China; (2) Berorientasi ke pemerintahan Hindia-Belanda, memahami kedudukan sebagai kawula Belanda dan melanjutkan hidup sebagai Tionghoa peranakan; dan (3) Berorientasi pada negara Indonesia.

Keanekaragaman etnis di Indonesia dapat terlihat nyata dalam semboyan *Bhineka Tunggal Ika*. Masyarakat Tionghoa merupakan kelompok etnis tersendiri. Apabila sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani di daerah pedesaan, maka orang Tionghoa Indonesia sebaliknya hampir sepanjang sejarah mereka hidup terkonsentrasi dengan kokoh dikota-kota besar dan kecil.

Pada masa pertumbuhan nasionalisme Indonesia, istilah bangsa digunakan untuk menunjukkan pengertian *nation*. Mayoritas kaum nasionalis Indonesia berfikir bahwa bangsa Indonesia itu meliputi anggota-anggota dari berbagai suku bangsa atau suku pribumi. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia berawal pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang mengeluarkan kebijakan tentang kependudukan Pasal 163 *Indische StaatSregelling Wet van 2 September 1854*, Ned. S. 1854-2, S. 1855-2 jo. 1, yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan penduduk, yakni : (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Timur Asing, seperti Tionghoa, India, Arab; dan (3) Golongan Pribumi. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk refleksi politik *divide et impera* Pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ditambah lagi dengan pemberian status istimewa oleh Belanda kepada etnis Tionghoa sehingga merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dan menganggap golongan pribumi lebih rendah.

Dari sudut kebudayaan, etnis Tionghoa terbagi atas Tionghoa peranakan dan Tionghoa *totok*. Tionghoa peranakan adalah orang Tionghoa yang sudah lama tinggal di Indonesia dan pada umumnya sudah berbaur dengan masyarakat pribumi, bahkan Tionghoa peranakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai

bahasa percakapan sehari-hari. Tionghoa *totok* adalah orang Tionghoa pendatang baru, pada umumnya Tionghoa *totok* baru satu atau tiga generasi dan masih menggunakan bahasa Tionghoa sebagai sarana untuk berkomunikasi sosial. Namun karena sudah terhentinya imigrasi dari daratan China, jumlah Tionghoa *totok* sudah menurun dan keturunan totok pun telah mengalami peranakanisasi. Oleh karena itu, generasi muda Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah menjadi peranakan, terutama yang berada di Pulau Jawa.

Tionghoa peranakan yang sudah menetap di Pulau Jawa sudah menganggap sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tionghoa *totok* yang merupakan pendatang baru dan masih mempunyai hubungan erat dengan negara China, maka dengan sendirinya *totok* berorientasi ke tanah leluhurnya. Namun pada tahun 1960-an terdapat kecenderungan beberapa pemuda Tionghoa *totok* untuk berkiblat ke Indonesia, namun kecenderungan itu hanya merupakan sebagian kecil jika dibandingkan dengan aliran yang berorientasi ke China.

Wilayah Surakarta pada tahun 1746 sudah terdapat Etnis Tionghoa yang dalam perkembangannya diharuskan menaati peraturan-peraturan pemerintah kolonial yang bersifat diskriminatif. *Wijkenstelsel* yang mengatur tentang daerah tempat tinggal sehingga etnis Tionghoa daerah tempat tinggalnya terpisah dari perkampungan pribumi dan mengelompok dengan etnis Tionghoa yang lain, *passenstelsel* yang mengatur ruang gerak etnis Tionghoa, UU Agraria juga menjelaskan bahwa etnis Tionghoa tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah (Benny Juwono, 1999 : 63).

Masyarakat minoritas Etnis Tionghoa Surakarta ditempatkan di Kampung Balong (Rustopo, 2007 : 63), kampung yang dibangun sejak jaman persekutuan dagang sampai pemerintahan Hindia-Belanda. Tahun 1911 pemerintah kolonial menghapuskan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* karena desakan yang terus menerus dilakukan oleh gerakan nasionalis etnis Tionghoa pada tahun 1904 sampai 1910, sehingga memberikan dampak yang positif bagi etnis Tionghoa, karena etnis Tionghoa dapat menyebar ke daerah lain. Kampung Balong tetap sebagai kampung *pecinan*, namun hanya etnis Tionghoa tingkat ekonomi menengah dan menengah kebawah yang tetap menempati perkampungan

tersebut. Komunikasi sosial etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi di sekitar kampung Balong berlangsung sangat akrab dan proses pembauran berlangsung secara alami, termasuk proses perkawinan campuran Tionghoa-Jawa yang berlangsung selama beberapa generasi. Sehingga Kampung Balong menjadi sebuah perkampungan yang heterogen, walaupun kesan sebagai perkampungan etnis Tionghoa masih bisa dirasakan.

Pada abad ke-20, masyarakat Tionghoa di Surakarta mulai menempati daerah strategis seperti Nonongan dan Coyudan (Rustopo, 2007:65). Tahun 1960-an para pedagang Tionghoa mayoritas sudah berdagang di lokasi-lokasi strategis, seperti jalan di sekitar Pasar Gede, Pasar Legi, dan sekitar pasar Singosari. Pada masa pemerintah presiden Soeharto (1966-1998) hampir semua lokasi pasar atau jalan utama yang berada di Surakarta ditempati oleh pedagang Tionghoa, bahkan pedagang tekstil Tionghoa sudah mulai masuk ke Pasar Klewer, pasar yang menjadi pusat perdagangan dan perputaran uang dalam bidang perdagangan tekstil yang seiring pula dengan kejayaan industri batik dan tenun khas Surakarta.

Meskipun keberadaan etnis Tionghoa di Surakarta dibatasi dengan peraturan-peraturan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, akan tetapi tidak mengurangi komunikasi sosial etnis Tionghoa, secara pribadi, kelembagaan atau bahkan dengan sunan dan para bangsawan (pangeran). Hubungan antara keraton dan beberapa tokoh Tionghoa terjalin cukup baik. Tanah beserta bangunan *Thiong Ting* (tempat untuk merawat jenazah) di Jebres adalah hadiah dari Pakubuwana VII untuk masyarakat Tionghoa di Surakarta dan sekitarnya. Sebidang tanah di daerah Pajang yang merupakan hadiah dari Mangkunegara III kepada keluarga Gan yang kemudian digunakan untuk makam keluarga Gan dan keturunannya yang beragama Islam. Gamelan pusaka keraton Surakarta *kiyai Kadukmanis dan Manisrengga* adalah hadiah dari *luitenant der chinezen van* Surakarta Tjan Sie Ing. Pluntur (tali untuk menggantungkan) gong kedua gamelan pusaka yaitu, *Kyai Sekar Delima dan Kyai Gerah Kapat*, dibuat dari benang sutera merah yang setiap tahun diganti. Sebagai tanda keakraban, setiap tahun Tjan Sie Ing mempersembahkan kucirnya ke keraton untuk bahan pembuatan pluntur kedua gong pusaka tersebut.

Asimilasi kebudayaan etnis Tionghoa dengan kebudayaan Jawa di Surakarta tahun 1966-1998 sangat menarik, karena di Kota Surakarta merupakan tempat dua istana (Kasunanan dan Mangkunegaran) yang mempunyai karakter berbeda sehingga proses pembauran antara mayoritas (Kasunanan dan Mangkunegaran) dan minoritas (etnis Tionghoa) tentunya terdapat permasalahan ataupun hambatan yang muncul dari berbagai pihak sehingga sangat menarik untuk diteliti dan Surakarta juga merupakan kota yang multirasial dan multikultural terdapat berbagai etnis termasuk etnis Tionghoa. Kurun waktu yang dipilih yaitu tahun 1966-1998, karena tahun 1966-1998 adalah masa proses transformasi sosial-budaya yang menyentuh lapisan yang paling bawah, ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan di bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya khususnya dari Tionghoa menjadi Jawa.

Dari paparan pendahuluan maka fokus permasalahan yang akan dikaji adalah apa yang menjadi latar belakang terjadinya asimilasi kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Jawa di Surakarta pada tahun 1966-1998?, bagaimana proses terjadinya asimilasi kebudayaan Tionghoa dengan budaya Jawa di Surakarta pada tahun 1966-1998?, bagaimana dampak asimilasi kebudayaan Tionghoa dan budaya Jawa Surakarta setelah tahun 1966-1998?, dan bagaimana relevansi hasil penelitian asimilasi etnis Tionghoa Surakarta tahun 1966-1998 bagi pendidikan multikultural?.

Tujuan penelitian yaitu mengetahui latar belakang terjadinya asimilasi kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Jawa di Surakarta pada tahun 1966-1998. Mengetahui proses terjadinya asimilasi kebudayaan Tionghoa dengan budaya Jawa di Surakarta pada tahun 1966-1998. Mengetahui dampak asimilasi kebudayaan Tionghoa dan budaya Jawa Surakarta setelah tahun 1966-1998. Serta mengetahui relevansi hasil penelitian asimilasi etnis Tionghoa Surakarta tahun 1966-1998 bagi pendidikan multikultural.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini disajikan secara kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan riset lapangan yang diperkuat dengan penelitian pustaka dengan menggunakan bahan literatur buku, majalah, catatan, maupun laporan hasil-hasil

penelitian yang lebih dulu dilakukan dan data-data yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji. Hal ini didasari atas pokok penelitian adalah Kajian tentang hubungan dan komunikasi etnis Tionghoa yang berada di Surakarta dengan pemerintah dan budaya masyarakat Jawa. Sehingga metode yang digunakan adalah Metode kualitatif.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Abdurrahman (1999) sumber primer dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata. Sedangkan sumber sekunder tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat berupa buku-buku, dokumen, artikel, koran, majalah. Untuk memperoleh data informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian, sumber data yang digunakan adalah sumber primer maupun sekunder informan dan studi pustaka. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan analisis studi pustaka.

Menurut Miles dan Hubberman (1992) teknik analisis data kualitatif adalah analisis data sejarah yang menggunakan hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain secara hubungan sebab akibat untuk menerangkan suatu peristiwa. Empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) sajian data; dan 4) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Latarbelakang Asimilasi budaya Tionghoa dengan budaya Jawa

Faktor intern dan faktor eksteren menjadi penentu latarbelakang asimilasi tionghoa di surakarta. Faktor intern meliputi kondisi masyarakat tionghoa di tengah mayoritas, serta faktor ekonomi sedangkan faktor ekstern meliputi kebijakan pemerintahan orde baru.

Tempat tinggal orang Tionghoa di Surakarta tersebar di berbagai daerah antara lain di Kampung Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Coyudan, Kelurahan Kemlayan, dan sekitar jalan utama Slamet Riyadi. Diantara Coyudan dan Slamet Riyadi, Kampung Balong adalah suatu perkampungan yang memang sengaja

digunakan sebagai tempat tinggal dan menetap orang Tionghoa. Daerah tempat tinggal etnis Tionghoa Surakarta menjadi satu dengan penduduk sekitar yang notabene adalah orang Jawa, baik di Kampung Balong ataupun Coyudan, secara tidak langsung etnis Tionghoa di Surakarta diwajibkan untuk menjalin relasi sosial dengan masyarakat Jawa, etnis Tionghoa tidak akan memungkinkan jika memilih untuk tetap mengeksklusifkan golongannya sendiri di tengah masyarakat mayoritas yang didominasi oleh orang-orang Jawa.

Salah satu cara untuk membaurkan etnis Tionghoa dengan masyarakat Jawa melalui perdagangan, dengan adanya Pasar Gede, secara tidak langsung juga memberikan dampak positif terhadap asimilasi yang terjadi. Kegiatan jual-beli yang terjadi di Pasar Gede sangat membantu dalam menjalin hubungan sosial antara orang Tionghoa dengan orang Jawa (Bapak Soegiono, 15 November 2014). Pedagang Tionghoa akan secara langsung berinteraksi dengan pembeli dari masyarakat Jawa ataupun sebaliknya, bahkan sesama pedagang yang berbeda etnis. Relasi sosial yang terjalin antara orang Tionghoa dengan Orang Jawa terjadi sangat sering dan terus berulang sehingga antara satu dengan lainnya tumbuh rasa saling menghormati, memiliki, dan mengasihi antar sesama.

Dampak kebijakan ekonomi pemerintah khususnya Orde Baru yang sangat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa, menimbulkan suasana yang dilematis. Di satu sisi larangan pemerintah yang membatasi dan memfiskuskan ruang gerak etnis Tionghoa pada bidang ekonomi sehingga terjadi peningkatan yang menakjubkan terhadap perekonomian warga Tionghoa, di sisi lain kegiatan perekonomian masyarakat Jawa menjadi semakin terpinggirkan. Sehingga dalam sektor perekonomian etnis Tionghoa menjadi sangat dominan dan terjadilah kerusuhan anti Tionghoa pada kurun waktu 1998, khususnya di Surakarta dan Jakarta.

Namun setelah peristiwa kerusuhan 1998, perekonomian Surakarta berangsur membaik dan pulih secara bertahap. Berbagai kerja sama dan hubungan-hubungan yang melibatkan antara orang Jawa dengan Orang Tionghoa dapat terjalin dengan baik. Menurut James D. Thompson dan William J. McEwen (Susanto, 1999), bahwa dalam masyarakat terdapat bentuk-bentuk kerja sama

yang antara lain berupa *bargaining*. Bentuk kerja sama *burgaining* adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih.

Hubungan di bidang ekonomi yang saling menguntungkan di antara masing-masing pihak. Orang Tionghoa menggunakan jasa orang Jawa begitupun sebaliknya, sehingga menyebabkan terjadinya interaksi yang berulang-ulang, pada akhirnya akan meningkatkan pola kerukunan dan terjadi asimilasi di antara etnis dan kelompok.

Warisan kekuasaan pemerintahan presiden Soekarno ke Soeharto, maka berakhir pula dominasi rezim Orde Lama dan diganti dengan rezim pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan rezim Orde Baru dengan Soeharto sebagai presiden memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan etnis Tionghoa di seluruh Indonesia.

Rezim Orde Baru dibawah kendali presiden Soeharto dengan jelas menginstruksikan kepada seluruh orang Tionghoa untuk melaksanakan dan mematuhi kebijakan-kebijakan politik yang bersifat diskriminatif dan mengisolasi golongan etnis Tionghoa. Berbagai peraturan yang dimulai dengan menutup semua sekolah yang berbahasa Tionghoa (1966), walaupun dari tahun 1968 sampai 1974 diperkenankan adanya Sekolah Nasional Proyek Khusus, yang kurikulumnya nasional, tetapi mata pelajaran bahasa Tionghoa hanya diperbolehkan sebagai ekstrakurikuler. Pada tahun 1967 juga dilarang menggunakan aksara Tionghoa di tempat umum, seperti merk toko atau perusahaan, buku, majalah, atau surat kabar. Dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang ditujukan kepada etnis Tionghoa merupakan bentuk dan perwujudan pelarangan segala bentuk kegiatan beraktifitas orang Tionghoa.

Semua peraturan dibuat oleh pemerintah Soeharto dengan alasan untuk mempercepat dan memperlancar proses asimilasi. Sehingga upaya mencari solusi yang pemerintah Orde Baru inginkan dapat tercapai, dan menghilangkan sifat eksklusif dari golongan etnis Tionghoa.

2. Proses Asimilasi Kebudayaan Tionghoa dengan Budaya Jawa

Proses asimilasi antara kebudayaan tionghoa dengan kebudayaan jawa dibagi menjadi dua masa yakni, masa orde lama dan masa orde baru. Orde lama Sejak pemerintahan Presiden Soekarno kisah kehadiran orang etnis Tionghoa di Indonesia adalah kisah liku yang bisa disebut hubungan cinta dan benci (*love-hate relationship*) antara minoritas etnis Tionghoa dan mayoritas masyarakat Indonesia. Di satu pihak etnis Tionghoa diperlukan karena mempunyai peran dalam perekonomian bangsa, dampak dari akibat kebijakan kolonial yang dengan sengaja mengasingkan etnis Tionghoa dalam kegiatan ekonomi yang diteruskan pada era kemerdekaan (Melly G. Tan, 2008).

Awal gerakan asimilasi di kalangan masyarakat Tionghoa Indonesia muncul pada tahun 1959. Hal tersebut muncul bersama dengan terjadinya kekacauan yang ditimbulkan oleh diberlakukannya larangan terhadap perdagangan secara eceran yang dilakukan orang-orang asing di wilayah pedesaan (PP 10 tahun 1959).

Golongan etnis Tionghoa masa orde lama, mempunyai konsep yang berbeda dari rezim Orde Baru tentang definisi dan konsep pembauran atau asimilasi. Pada tahun 1960 muncullah suatu konsep tentang asimilasi yang wajar, yang lebih menekankan sifat sukarela dari pembauran, dan tidak membenarkan hambatan yang sengaja dibuat terhadap proses asimilasi, tetapi juga sebaliknya tidak dapat menyetujui tindakan paksaan asimilasi. Konsep dan definisi tentang asimilasi yang wajar juga dimuat dalam media-media milik pengusaha Tionghoa dan konsep tersebut ditandatangani oleh sepuluh kaum intelektual peranakan Tionghoa, antara lain Ong Hok Ham (Onghokham), dan Drs. Lauwchuantho (H. Junus Jahja). Pada tahun 1961, Presiden Sukarno tidak mendukung kebijakan penggantian nama bagi orang Tionghoa Indonesia, karena menurut presiden Sukarno perubahan identitas adalah hak pribadi seseorang yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk pemerintah.

Konsep asimilasi yang dimiliki oleh peranakan Tionghoa ini berkembang dan menjadi landasan atas dibentuknya Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) di bawah naungan Departemen Dalam Negeri dan dipimpin oleh K. Sindhunata. Konsep asimilasi lebih menekankan proses peleburan dalam

masyarakat mayoritas dari tempat tinggal orang Tionghoa. H. Junus Jahja mempunyai keyakinan bahwa masalah tentang Tionghoa dapat diselesaikan lewat jalur agama, yaitu dengan menjadi muallaf atau masuk dan mempelajari agama Islam. Ajaran dan agama Islam sudah mendapat tempat tersendiri bagi kebanyakan orang Tionghoa.

Semenjak pergantian presiden dari Sukarno ke Suharto, banyak sekali terjadi perubahan kebijakan atau penerapan kebijakan baru pada berbagai bidang, terutama pada permasalahan etnis Tionghoa. Pada era Orde Baru, asimilasi yang dilakukan berdasarkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu berusaha untuk mewujudkan asimilasi total pada seluruh aspek kehidupan orang Tionghoa.

Berbeda dengan presiden Sukarno, Presiden Suharto justru mendukung dan menerapkan kebijakan mengenai penggantian nama bagi orang Tionghoa. Pada tahun 1966, presiden Suharto mendukung asimilasi total orang Tionghoa Indonesia menjadi warga negara Indonesia seutuhnya melalui penggantian nama. Orde Baru justru menganggap penggantian nama merupakan tindakan simbolik untuk menyatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia setia kepada pemerintah Indonesia.

Tidak semua orang Tionghoa mematuhi dan melaksanakan kebijakan penggantian nama, namun ada juga yang dapat menerima dan melaksanakan peraturan pemerintah dengan mengganti nama Tionghoa menjadi Indonesia baik secara perorangan, maupun perusahaan.

3. Dampak Asimilasi budaya Tionghoa dengan budaya Jawa.

Dampak terjadinya asimilasi antara kebudayaan tionghoa dengan kebudayaan Jawa tertuang dalam seni pertunjukan dan juga perayaan hari besar. Seni pertunjukan dalam asimilasi ini adalah adanya pertunjukan Barongsai, dalam kancah internasional dikenal dengan sebutan *Lion dance* (tarian singa). Kata Barongsai berasal dari kata “barong” dari bahasa Indonesia yang berarti lompat,

dan kata “sai” yang merupakan bahasa asli Tionghoa dialek bahasa Fujian (Hokkian) yang berarti singa, dapat disimpulkan bahwa kata Barongsai berarti singa yang melompat-lompat (Wahyudiarto, 2009: 194).

Terdapat sejumlah fenomena menarik jika membahas tentang seni pertunjukkan barongsai dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Surakarta. Kebangkitan pertunjukkan barongsai yang selalu turut hadir dan digunakan oleh masyarakat Tionghoa dalam aktivitas kehidupan, baik ketika melakukan ritual, hiburan, atau sekedar tontonan.

Interaksi antar etnis yang melibatkan masyarakat Tionghoa dengan Jawa di Surakarta membawa pada suatu proses pembauran. Pembauran terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah pembauran kebudayaan. Pembauran kebudayaan yang terjadi antara masyarakat Tionghoa dan Jawa melalui seni pertunjukkan Barongsai. Sehingga banyak memunculkan perkumpulan seni pertunjukkan Barongsai di Surakarta.

Dengan adanya wadah untuk mengembangkan dan melatih bakat dalam bidang seni pertunjukkan Barongsai, sekaligus juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana interaksi antara etnis Tionghoa dengan warga pribumi. Dapat dilihat dengan adanya partisipasi orang Jawa yang masuk dan bergabung dalam kelompok dan ikut memainkan seni pertunjukkan Barongsai. Mayoritas pemain Barongsai adalah orang-orang Jawa. Hal itu dibenarkan oleh Sigit Purnomo yang merupakan salah satu pemain Barongsai yang berdarah Jawa mengungkapkan bahwa “kesenian Barongsai terbuka bagi semua orang, tidak memperdulikan latar belakang etnis, Barongsai adalah seni pertunjukkan yang unik sehingga banyak orang tertarik untuk terlibat memainkannya (wawancara 15 Desember 2014)”.

Seni pertunjukan selanjutnya adalah Wayang Potehi. Kata Potehi berasal dari kata *Poo* berarti kain, *Tay* (kantong), *Hie* (wayang). Secara lengkap istilah Potehi memiliki arti boneka kantong atau wayang kantong. Cara memainkan wayang Potehi beda dengan cara memainkan wayang kulit, dengan memasukkan jari tangan ke dalam kantong kain dan menggerakannya sesuai dengan jalan cerita. Jumlah Orang (dalang) yang memainkan wayang adalah 2 orang, masing masing memegang 2 wayang. Salah satu menjadi dalang inti yang bertugas

menyampaikan kisah atau lakon wayang, sementara asisten dalang bertugas membantu dalang inti dalam menampilkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita.

Wayang Potehi tidak hanya sekedar sebagai seni pertunjukkan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan ritual. Misi yang dikandung dalam ceritera wayang Potehi tidak jauh berbeda dengan wayang pada umumnya. Salah satu bentuk akulturasi dan asimilasi budaya Tionghoa yang dilahirkan di Jawa adalah seni sastra dan wayang. Salah satu faktor yang memperlancar proses akulturasi dan asimilasi budaya Tionghoa-Jawa adalah persamaan nilai-nilai social budaya yang terkandung dalam ceritera atau kisah dalam wayang. Dalam asimilasi, yang terpenting adalah penggabungan golongan-golongan yang berbeda latar belakang kebudayaan menjadi kebulatan sosiologis dan budaya.

Kebijakan politik pada masa Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto berperan sangat besar dalam kepunahan budaya Nusantara. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan yang behubungan dengan Tionghoa dilarang untuk dikaji, diekspose, dibicarakan, dan dimanfaatkan sehingga wayang Potehi tidak masuk dalam jenis warisan budaya khususnya wayang.

Sedangkan dalam perayaan hari besar tercipta dalam perayaan imlek dan juga cap go meh. Para warga etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Surakarta masih merayakan hari besar yang berkaitan dengan peri kehidupan etnis Tionghoa, meskipun tata cara dan pelaksanaan mengalami perubahan akibat dari pembauran dengan masyarakat asli (mayoritas). Perayaan tahun baru Imlek juga disebut sebagai pesta musim semi (*Cung Jie/Ch'ung Chieh*) di Tiongkok, namun karena di Indonesia tidak ada musim semi maka warga Tionghoa di Indonesia biasa menyebut dengan Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek dirayakan pada tanggal 1 penanggalan Imlek yang biasa jatuh tempo pada sekitar akhir Januari sampai awal Februari pada penanggalan Masehi.

Pada Hari Raya Imlek pada umumnya orang-orang Tionghoa melakukan budaya mudik sama seperti yang dilakukan orang Islam ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri. Berkumpul bersama keluarga besar selama \pm 15 hari, dan pada

puncaknya tahun baru Imlek akan diakhiri dengan melakukan perayaan *Cap Go Meh* (malam lima belas).

Perayaan Hari Raya imlek adalah bukti bahwa telah terjadinya permbauran kebudayaan Tionghoa, tata cara yang dilakukan dalam melaksanakan perayaan tersebut hampir sama dengan tata cara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yaitu dengan melakukan kirab dan diakhiri dengan rebutan tumpeng. Kebudayaan Tionghoa dapat dijadikan modal untuk menciptakan sebuah asimilasi total dan penghargaan atas identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multikultural sesuai dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.

Perayaan *Cap Go Meh* adalah lafal dialek Tio Cio dan Hokkian, artinya malam 15, sedangkan lafal dialek Hakka Cang Njiat Pan, artinya pertengahan bulan satu. Hari raya *Cap Go Meh* atau *Yuan Xiaojie* dalam bahasa Tionggok yang jatuh pada tanggal 15 bulan pertama tahun baru Imlek adalah salah satu hari raya tradisional daratan Tionggok.

Berbagai kegiatan disiapkan guna mempersiapkan dan menyambut hari raya *Cap Go Meh*, masyarakat Tionghoa mengadakan pawai atau kirab dengan diikuti pertunjukkan Barongsai dan Liong yang dimulai dari tempat ibadah. Masyarakat Tionghoa dalam merayakan *Cap Go Meh* juga membuat lampion yang dipasang di sepanjang jalan-jalan utama.

Simbol yang digunakan dalam upacara *Cap Go Meh* mempunyai maksud dan tujuan yang baik untuk kebaikan seluruh masyarakat Tionghoa. Pada perayaan *Cap Go Meh* juga terdapat mitos-mitos yang dipercaya dan dianggap memberikan berkah dan rezeki berlimpah selama menjalani satu tahun berikutnya, namun ada juga. Sebagian besar simbol yang dipakai memiliki arti tentang kemakmuran, keselamatan, kebahagiaan.

Esensi perayaan *Cap Go Meh* merupakan perwujudan dari rasa syukur dan berbagai harapan terhadap leluhur ataupun sesama umat manusia. Perayaan *Cap Go Meh* juga dapat membangkitkan, membangun, dan menguatkan identitas budaya Tionghoa.

4. Relevansi Asimilasi budaya Tionghoa dengan Budaya Jawa bagi Pendidikan Multikultural

Pengertian multikultural menurut Parekh (1997), meliputi tiga hal, pertama, multikulturalisme yang berkenaan dengan budaya; kedua, multikulturalisme yang merujuk pada keragaman yang ada; dan ketiga, multikulturalisme yang berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman yang ada.

Multikulturalisme dapat menimbulkan dua dampak, yakni negatif dan positif. Multikulturalisme dapat dikatakan negatif apabila muncul sikap fanatisme berlebihan terhadap budaya yang dimiliki dalam masyarakat, sikap fanatisme yang berlebihan dapat menimbulkan pertentangan di dalam kebudayaan. Sedangkan multikulturalisme dapat dikatakan positif apabila muncul rasa toleransi terhadap keberagaman budaya, dan tidak menonjolkan egoisme budaya masing-masing daerah maka hal tersebut mampu menjadi pengikat dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap saling menghargai, toleransi, mampu hidup bersama dalam keragaman adalah tujuan dari multikulturalisme, yang dapat dimiliki setiap insan melalui pendidikan, yang dikenal dengan pendidikan multikultural.

Selain itu, konsep lain yang dibutuhkan untuk mencapai pendidikan multikulturalisme adalah adanya pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukan suatu pemberian, tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas.

Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap anak peserta didik. Perbedaan dari diri anak didik yang harus diakui dalam pendidikan multikultural, antara lain mencakup penduduk minoritas etnis dan ras, kelompok pemeluk agama, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, kondisi ekonomi, daerah asal/usul, ketidakmampuan fisik dan mental, kelompok umur, dan lain-lain (Baker, 1994: 11).

Bentuk dan pengembangan pendidikan multikultural di setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi masing-

masing negara. Indonesia adalah salah satu negara yang multikultural terbesar didunia, kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari sosio kultur maupun geografis yang begitu beragam dan luas.

Pendidikan multikultural memiliki nilai-nilai inti yakni nilai humanisme, demokratis dan pluralisme. Pendidikan multikultural memiliki landasan dalam undang-undang dan sistem pendidikan (SISDIKNAS) tahun 2003 pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asai manusia (HAM), nilai agama, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan multikultural juga didasarkan pada keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan.

Konsep penggunaan Asimilasi budaya Tionghoa dengan Jawa sebagai materi tambahan dalam pembelajaran sejarah, lebih tepat digunakan dalam lingkungan pembelajaran tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dikutip dalam Djumhur dan Danu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan dalam bukunya Bagian Satu: Pendidikan, bahwa usia dewasa, antara 15-17 tahun merupakan usia yang matang. Siswa yang telah memasuki usia tersebut belajar di Taman Menengah. Mereka dianggap telah memasuki periode ma'rifat. Materi yang diberikan haruslah berkaitan dengan etika dan kesusilaan, termasuk dasar-dasar kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan dan lain sebagainya (Djumhur dan Danu, 1976:23).

Penggunaan Asimilasi budaya Tionghoa dengan Jawa sebagai materi tambahan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah SMA kelas XI wajib, dapat dimasukkan dalam materi Perjuangan Memperjuangkan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan politik dan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan menggunakan berbagai macam cara dan strategi pendidikan serta mengimplementasikannya dengan visi, misi yang selalu menegakan, menghargai pluralisme, demokrasi dan humanisme maka. Dengan menggunakan berbagai macam cara maupun strategi pendidikan, serta mengimplementasikannya dengan visi-misi yang selalu menegakan, menghargai

pluralisme, demokrasi dan humanisme. Diharapkan para generasi penerus mampu menjadi "Generasi Multikultural" yang menghargai perbedaan, selalu menegakan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kemanusiaan.

D. Kesimpulan

Faktor intern dan faktor eksteren menjadi penentu latarbelakang asimilasi tionghoa di surakarta. Faktor intern meliputi kondisi masyarakat tionghoa di tengah mayoritas, serta faktor ekonomi sedangkan faktor ekstern meliputi kebijakan pemerintahan orde baru.

Proses asimilasi antara kebudayaan tionghoa dengan kebudayaan jawa dibagi menjadi dua masa yakni, masa orde lama dan masa orde baru. Orde lama Sejak pemerintahan Presiden Soekarno kisah kehadiran orang etnis Tionghoa di Indonesia adalah kisah liku yang bisa disebut hubungan cinta dan benci (*love-hate relationship*) antara minoritas etnis Tionghoa dan mayoritas masyarakat Indonesia. Di satu pihak etnis Tionghoa diperlukan karena mempunyai peran dalam perekonomian bangsa, dampak dari akibat kebijakan kolonial yang dengan sengaja mengasingkan etnis Tionghoa dalam kegiatan ekonomi yang diteruskan pada era kemerdekaan (Melly G. Tan, 2008). Berbeda dengan presiden Sukarno, Presiden Suharto justru mendukung dan menerapkan kebijakan mengenai penggantian nama bagi orang Tionghoa. Pada tahun 1966, presiden Suharto mendukung asimilasi total orang Tionghoa Indonesia menjadi warga negara Indonesia seutuhnya melalui penggantian nama. Orde Baru justru menganggap penggantian nama merupakan tindakan simbolik untuk menyatakan bahwa orang Tionghoa Indonesia setia kepada pemerintah Indonesia.

Dampak terjadinya asimilasi antara kebudayaan tionghoa dengan kebudayaan Jawa tertuang dalam seni pertunjukan dan juga perayaan hari besar. Seni pertunjukan dalam asimilasi ini adalah adanya pertunjukan Barongsai, dalam kancan internasional dikenal dengan sebutan *Lion dance* (tarian singa). Kata Barongsai berasal dari kata "barong" dari bahasa Indonesia yang berarti lompat, dan kata "sai" yang merupakan bahasa asli Tionghoa dialek bahasa Fujian

(Hokkian) yang berarti singa, dapat disimpulkan bahwa kata Barongsai berarti singa yang melompat-lompat . selain itu, Seni pertunjukan yang lain adalah Wayang Potehi. Kata Potehi berasal dari kata *Poo* berarti kain, *Tay* (kantong), *Hie* (wayang). Secara lengkap istilah Potehi memiliki arti boneka kantong atau wayang kantong. Wayang Potehi tidak hanya sekedar sebagai seni pertunjukkan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial dan ritual.

Relevansiasimilasi budaya Tionghoa dengan Jawa sebagai materi tambahan dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah SMA kelas XI wajib, dapat dimasukkan dalam materi Perjuangan Memperjuangkan Kemerdekaan dari Ancaman Sekutu dan Belanda dengan tujuan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan politik dan perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Erniwati. (2007). *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat*. Jogjakarta: Ombak
- Frederick, B. (1988). *Kelompok Etnis dan Batasannya*. Terjemahan Nining L. S. Jakarta: UI Press
- Greif, Stuart. W. (1991). *WNI: Problematik Orang Indonesia Asal Cina*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Horowitz, D. (1975). *Ethnic Identity, in Ethnicity: Theory and Experience*. Harvard University Press
- Jahja, J. (1988). *Catatan Seorang WNI, Kenangan, Renungan, Harapan*. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa
- Jamu'in, M. (2001). *Memupus Silang-Sengkarut Relasi Jawa-Tionghoa: Panduan Advokasi Untuk Membangun Rekonsiliasi*. Surakarta: Ciscore
- Nasikun. (2005). *Imperatif Pendidikan Multikultural di Masyarakat Majemuk*. Makalah disampaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Sabtu, 8 Januari 2005 di Ruang Seminar FE UMS.
- Onghokham. (2005). *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*. Depok: Komunitas Bambu
- Rahardjo, T. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness Dalam Komunikasi antar etnis*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar
- Setyono, B. G. (2008). *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia

- Suryadinata, L. (1986). *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- _____. (1988). *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- _____. (1990). *Mencari Identitas Nasional, dari Tjoe Bou San sampai YapThiam Hien*. Jakarta: LP3ES
- _____. (1996). *Sastra Peranakan Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo
- _____. (2002). *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Sutarno. (2007). *Pendidikan Multikultural*. Jakarta: Ditjen Dikti
- Tan, G. M. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tarmizi, T. (1997). *Masyarakat Cina Ketahanan Nasional dan integrasi Bangsa indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Kekuatan dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindoan
- Toer, P.A. (1998). *Hoakiau di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya
- Verdiansyah, C. (ed). (2007). *Jalan Panjang Menuju WNI: Catatan Pengalaman dan Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Wang Gungwu. (1991). *Kajian Tentang Identitas Orang Cina di Indonesia dalam Perubahan Identitas Tionghoa di Asia Tenggara*. Terjemahan Ahmad. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Yusuf, I. A. (2005). *Kematian, dan Identitas Budaya Minoritas (Representasi Etnik Tionghoa dalam Iklan Duka Cita)*. Yogyakarta: UII Press

JURNAL

- Bachrun, C. (2000). *Barongsai: Singa atau Naga?*. Lembaran berita KATA, vol. 3 No. 1 hlm. 11-12